



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online*

SUBJEK

EKONOMI

Selasa, 15 Juli 2023

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2023**

## **Daftar Isi**

1. ICMI USULKAN PERAN EKONOMI SYARIAH DIPERKUAL DALAM RPJPN – *Media Online Republika*

# REPUBLIKA

SELASA, 15 AGUSTUS 2023

» EKONOMI

## ICMI Usulkan Peran Ekonomi Syariah Diperkuat dalam RPJPN

*Berbagai instrumen ekonomi syariah harus dimanfaatkan secara optimal.*

■ Oleh Ratna Ajeng Tejomukti

JAKARTA-- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengusulkan ekonomi syariah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. ICMI mendorong agar ekonomi syariah ditegaskan sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung penguatan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan pada pertemuan Majelis Pengurus Pusat ICMI yang dipimpin Ketua Umum ICMI Prof Arif Satria dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (14/8/2023). Kunjungan ICMI tersebut untuk memberikan masukan soal RPJPN

Instrumen ekonomi syariah ini harus dimanfaatkan secara optimal sejalan dengan visi Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia pada 2024. Selain itu, ICMI mengusulkan penambahan satu bagan pada Transformasi Sosial, yaitu IE4 Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Masukan itu disampaikan karena potensi dana sosial keagamaan sangat besar. Sebagai contoh, potensi zakat mencapai angka 327 triliun dan potensi wakaf uang Rp 180 triliun. Artinya, ada potensi dana minimal Rp 500 triliun yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Dana sosial keagamaan merupakan bentuk konkret solidaritas sosial masyarakat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi modal sosial yang perlu dioptimalkan dalam pembangunan nasional," ujar Irfan.

ICMI juga mengusulkan pemanfaatan dana sosial keagamaan, termasuk pada narasi Penuntasan Kemiskinan di RPJPN, mengingat masih tingginya kesenjangan antara potensi dana sosial keagamaan, terutama ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dan realisasinya.

Itu karena ziswaf belum diprioritaskan dalam kebijakan sosial ekonomi negara.

Rencananya, RPJPN akan diajukan ke DPR dan menjadi RUU pada akhir 2023, kemudian setelah disetujui akan menjadi

2025-2045 demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. "Kami mengusulkan ekonomi syariah perlu disebutkan secara eksplisit dalam narasi Mewujudkan Transformasi Ekonomi di RPJPN 2025-2045 sebagai bagian dari delapan agenda pembangunan 2045," kata Irfan Syauqi Beik, koordinator Pokja RPJPN ICMI Bidang Ekonomi Syariah.

Menurut Irfan, dengan potensi yang sangat besar dan peluang pasar yang terus berkembang secara global, Indonesia harus dapat memanfaatkannya dengan optimal, terutama dari sisi suplai. "Oleh karena itu, dimasukkannya ekonomi syariah secara eksplisit pada bagian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi

undang-undang. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas, yang berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan, telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan agar mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Visi Indonesia Emas 2045 juga menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati nol persen dan ketimpangan berkurang. Untuk mewujudkan target tersebut, RPJPN 2025-2045 telah merumuskan delapan Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan, yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.

Ketua Umum ICMI Arif Satria dalam pertemuan dengan Bappenas menyampaikan pokok-pokok pikiran dari hasil tim (pokja) RPJPN ICMI yang diharapkan dapat masuk pada 8 agenda pembangunan dan 17 arah pembangunan RPJPN 2025-2045 tersebut. "Pokok-pokok pikiran yang disampaikan langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas ini kiranya dapat memperkaya khazanah kajian dalam pembahasan dan penetapan RPJPN 2025-2045 sebagai roadmap Indonesia ke depan. Ini jadi komitmen ICMI untuk berkontribusi dalam

Indonesia. Instrumen ekonomi syariah, baik industri halal (sektor riil), industri keuangan syariah, maupun keuangan sosial syariah, harus masuk dalam transformasi super prioritas di RPJPN tersebut," kata dia.

Sebagai tindak lanjut dari usulan memasukkan ekonomi syariah pada narasi Mewujudkan Transformasi Ekonomi di RPJPN 2025-2045, lanjut Irfan, hal tersebut harus direalisasikan dalam 17 arah (tujuan) pembangunan. "Tidak hanya bisa menjadi penguatan perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi syariah juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru sehingga menjadi bagian dari 17 arah (tujuan, Red) pembangunan," ujar Irfan.

pemikiran pembangunan nasional," kata Arif.

Dia mengatakan, sebagai organisasi cendekiawan yang memiliki identitas keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan, ICMI telah melakukan langkah-langkah proaktif. ICMI membentuk Kelompok Kerja (Pokja) RPJPN, mengadakan pertemuan dan rapat-rapat tim, hingga menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD) hingga menghasilkan pokok-pokok pikiran prinsip perencanaan pembangunan.

"Dalam Penyusunan RPJPN 2025-2045, ICMI mengusulkan perencanaan pembangunan berfokus pada prinsip kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan," ujar dia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyambut baik masukan dan usulan MPP ICMI untuk RPJPN tersebut. Dia menyampaikan, RPJPN ini disusun atas amanat Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan setiap 20 tahun sekali.

"Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 ini bisa menjadi penentu arah pembangunan jangka panjang. Usulan dan masukan yang disampaikan ICMI akan menjadi bahan perbaikan," kata Suharso yang didampingi Deputy Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widayanti.

Kolom: Ekonomi